

**PERAN PANITIA KERJA PEMBENTUKAN KABUPATEN  
AGAM TUO DALAM UPAYA PEMEKARAN DARI  
KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

*Oleh:*

**RIFAN**  
**03193012**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

## ABSTRAK

**Rifan. 03 193 012. Peran Panitia Kerja Pembentukan Kabupaten Agam Tuo Dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Agam. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.**

Penelitian ini menggambarkan Peran Panitia Kerja Pembentukan Kabupaten Agam Tuo Dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Agam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Sedangkan teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang mendukung penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan diperoleh data bahwa pemekaran yang diupayakan panitia kerja pembentukan Kabupaten Agam tuo merupakan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang mereka terima dan penolakan terhadap PP No. 84 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan peran Panitia Kerja Pembentukan Kabupaten Agam Tuo dalam upaya pemekaran Kabupaten Agam mempunyai peran yaitu menggalang aspirasi masyarakat. Yaitu dengan mengundang tokoh masyarakat untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan sepakat untuk melakukan pemekaran. Membentuk Panitia Kerja Pembentukan Kabupaten Agam Tuo untuk melaksanakan rencana pemekaran. Menyampaikan aspirasi masyarakat yaitu mengirimkan bahan kajian kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Agam untuk ditindak lanjuti, dan dari DPRD sudah disetujui untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang diwakili panitia kerja, namun dari pemerintah Kabupaten Agam belum ada tindak lanjut sampai sekarang

Kendala yang dihadapi oleh Panitia Kerja Pembentukan Kabupaten Agam Tuo sampai saat sekarang adalah belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam hal ini yaitu Bupati Kabupaten Agam .

**Kata kunci :** kelompok kepentingan, peran, pemekaran daerah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang dilakukan rekan-rekan mahasiswa pada pertengahan tahun 1998 telah membawa perubahan terhadap berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tidak hanya mengusung pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan juga bukan pula sebagai pemangkas kekuasaan rezim sentralistik Presiden Soeharto, tetapi reformasi merupakan titik tonggak terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya berbagai peraturan-peraturan berupa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan, seperti UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan masih banyak peraturan lainnya.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Otonomi tidak saja memaparkan tentang hak-hak daerah, akan tetapi juga memunculkan berbagai kewajiban bagi pemerintah daerah salah satunya, memperbaiki kualitas kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Karena aspek pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sehingga daerah dapat memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa

dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>1</sup>.

Otonomi daerah yang dilaksanakan semenjak tahun 2000, telah mengubah struktur pemerintahan di daerah. Hal tersebut terlihat dengan, daerah memiliki hak untuk dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab, serta dilaksanakan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah tersebut.

Otonomi daerah menuntut pemerintah di daerah harus mampu mencermati dan menyikapi dengan arif apa yang menjadi keinginan masyarakat secara partisipatif, transparan dan ekonomis. Tuntutan akan profesionalitas aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan sangat penting dan merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik<sup>2</sup>. Agar prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut dapat terwujud, salah satunya dapat ditelusuri dari aspek pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, dimana pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional. Apalagi saat ini masyarakat cenderung sudah lebih kritis dalam menilai kinerja aparatur pemerintah, yang menandakan masyarakat sudah mulai menjalankan fungsinya sebagai pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian, aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, dan responsif.

<sup>1</sup> UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Edyanus Herman Halim, *Menangkap Momentum Otonomi Daerah* (Pekanbaru :Unri Pres, 2002), hlm.135.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan Panitia Kerja Pembentukan Agam Tuo dalam memperjuangkan tuntutannya yaitu pemekaran agam tuo menjadi sebuah kabupaten yang mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Panitia Kerja Pembentukan Kabupaten Agam Tuo terkategori sebagai kelompok kepentingan non asosiasional dengan ciri-ciri yaitu Panitia Kerja Pembentukan Kabupaten Agam Tuo digerakkan oleh sekelompok masyarakat dari berbagai macam suku bukan elit politik yang profesional, kegiatannya masih bersifat kadangkala, keanggotaannya diperoleh berdasarkan kepentingan-kepentingan yang serupa karena persamaan-persamaan dalam hal-hal tertentu yaitu kesamaan regional atau daerah domisili yaitu di Agam Tuo atau Agam Timur, pendukung dapat mengartikulasikan kepentingannya kepada pemuka-pemuka suku masyarakat itu sendiri, serta cara yang sering digunakan untuk mencapai tuntutannya adalah cara-cara informal.

Otonomi daerah menuntut adanya pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, dan responsif. Namun pelaksanaan pelayanan publik ini belumlah berjalan dengan efektif dan efisien hal ini sangat dirasakan masyarakat Agam yang berdomisili di Agam Timur, hal ini dirasakan semenjak ibu kota Kabupaten Agam dipindahkan ke Lubuk Basung pada tanggal 19 Juli 1993.

## DAFTAR PUSTAKA

- Doyle Paul Jhonson, 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Gramedia. Jakarta.
- Fathurrohman, Deden, 2002. *Pengantar Ilmu Politik*, Universitas Muhammadiyah Malang .
- Koentjaraningrat, 1986. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, CV. Rajawali. Jakarta.
- Hanif, Norcholis. 2005. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Haryanto, 1982, *istem Politik Suatu Pengantar*. Liberty. Yokyakarta.
- Herman Halim, Edyanus, *Menangkap Momentum Otonomi Daerah*. Unri Pres. Pekanbaru.
- Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2004. *Sostologi dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryadi Budi, 2006 *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. IRCiSoD. Yogyakarta.
- Topotimasang, Roem, Mansour Fakih, dan Toto Rahardjo. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Varma, SP, 2003. *Teori Politik Modern*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Timur, Mahardika , 2000, *Gerakan Massa "Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan Secara Damai"*, Laper Pustaka Utama, Yokyakarta.